ANALISIS KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN UNTUK AUDITOR SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN

Hasriani¹, Wiwi Astiawati², Masyhuri³

anhiynhyy@gmail.com¹, wiiastawati04@gmail.com², masyhuri.akuntansi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Auditor syariah berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan kebijakan lembaga keuangan syariah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Fungsi ini tidak hanya menyangkut aspek kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (kajian pustaka) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis, suatu metode yang digunakan dengan jalan menelaah beberapa buku sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam analisis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk auditor syariah menunjukkan bahwa profesi ini bukanlah pekerjaan yang sederhana. Ia berada di titik pertemuan antara akuntansi, syariah, hukum, manajemen, dan etika. Dengan kompleksitas tugas tersebut, penguatan kapasitas dan profesionalisme auditor syariah menjadi prioritas utama dalam menjaga kredibilitas dan integritas sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Keterampilan, Auditor Syariah, Lembaga Keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah yang pesat dalam beberapa dekade terakhir menandai adanya pergeseran signifikan dalam tatanan sistem keuangan global. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dengan membawa misi untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai instrumen dan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, hingga fintech syariah semakin menunjukkan eksistensinya di pasar domestik maupun internasional. Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan potensi besar sektor ini, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga integritas dan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip hukum Islam (sharia compliance). (Sakti 2021)

Dalam konteks ini, peran auditor syariah menjadi sangat vital. Auditor syariah berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan kebijakan lembaga keuangan syariah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Fungsi ini tidak hanya menyangkut aspek kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, tugas auditor syariah tidak bisa dipandang semata-mata sebagai aktivitas audit administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian dan legitimasi sistem ekonomi syariah itu sendiri.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh auditor syariah cukup kompleks. Tidak hanya dituntut untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi dan audit secara umum, auditor syariah juga harus menguasai fikih muamalah, ushul fiqh, serta berbagai fatwa dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun lembaga fatwa lainnya. Di samping itu, dengan semakin kompleksnya produk dan transaksi keuangan syariah, auditor syariah juga dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang tajam, keterampilan komunikasi

yang baik, serta pemahaman terhadap regulasi dan dinamika industri keuangan secara luas. Oleh karena itu, analisis terhadap keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi auditor syariah menjadi sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan, pelatihan profesional, serta standarisasi kompetensi dalam industri keuangan syariah. (Nuha 2021)

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi terhadap profesionalisme dalam pengawasan syariah, berbagai lembaga telah berupaya menetapkan standar dan kerangka kompetensi bagi auditor syariah. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan lapangan dengan kesiapan sumber daya manusia yang tersedia. Banyak auditor syariah yang berasal dari latar belakang keuangan atau akuntansi tanpa pemahaman syariah yang memadai, begitu pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan efektivitas audit syariah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai profil kompetensi yang ideal bagi auditor syariah yang mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.

Kajian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan internal lembaga keuangan syariah, tetapi juga berperan dalam peningkatan kualitas tata kelola (governance) dan kredibilitas industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan analisis yang komprehensif terhadap keterampilan dan pengetahuan auditor syariah, diharapkan dapat dirumuskan standar kompetensi yang jelas dan aplikatif yang dapat dijadikan acuan oleh institusi pendidikan, lembaga sertifikasi profesi, serta regulator dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang ini. Lebih jauh lagi, penguatan kompetensi auditor syariah juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa sistem keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen yang mendukung keadilan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan kemaslahatan umat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Auditor Syariah

Auditor syariah adalah profesi yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan transaksi dalam lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. Secara umum, auditor syariah dapat dipahami sebagai seorang profesional yang melakukan proses evaluasi dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance) atas operasional suatu lembaga, baik secara internal maupun eksternal. Tidak seperti auditor konvensional yang berfokus pada kelayakan laporan keuangan dan efisiensi proses bisnis semata, auditor syariah memiliki cakupan kerja yang lebih luas, karena mencakup aspek moral, hukum Islam, dan nilai-nilai spiritual yang melekat dalam seluruh aspek transaksi ekonomi. (Lubis 2023)

Dalam kerangka ekonomi Islam, keberadaan auditor syariah bukan hanya sebagai fungsi teknis pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme penjaga akuntabilitas dan integritas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini selaras dengan konsep hisbah dalam sejarah Islam, yakni lembaga pengawasan yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum syariah dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam urusan muamalah dan transaksi ekonomi. Auditor syariah modern bisa dianggap sebagai wujud kontemporer dari fungsi muhtasib, yang berperan dalam memastikan keadilan, transparansi, dan etika dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, peran auditor syariah bukan hanya administratif, tetapi juga ideologis dan etis, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan umat terhadap sistem keuangan syariah.

Auditor syariah harus memiliki penguasaan terhadap dua dimensi pengetahuan utama. Pertama, adalah pengetahuan teknis terkait audit, akuntansi, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Pengetahuan ini bersifat umum dan biasanya juga dimiliki oleh auditor konvensional. Kedua, adalah pengetahuan syariah yang mencakup fiqh muamalah, prinsip dasar transaksi halal dan haram, serta pemahaman terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) atau lembaga fatwa setempat. Pemahaman terhadap dua dimensi ini sangat penting agar auditor syariah mampu menjembatani kebutuhan praktis bisnis dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara harmonis.

Auditor syariah juga harus memiliki kepekaan terhadap dinamika inovasi produk dan layanan dalam industri keuangan syariah. Produk-produk baru seperti sukuk hybrid, fintech syariah, crowdfunding Islam, serta derivatif syariah menuntut pemahaman yang tidak hanya tekstual terhadap fatwa, tetapi juga kontekstual terhadap praktik-praktik bisnis modern. Oleh karena itu, auditor syariah tidak boleh hanya menjadi “penafsir hukum” secara literal, melainkan harus mampu menerapkan prinsip maqashid syariah dalam setiap evaluasi, yaitu menilai apakah suatu aktivitas atau produk sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam seperti keadilan, perlindungan hak, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup umat. (Khasani 2023)

Selain itu, auditor syariah juga memiliki tanggung jawab terhadap laporan audit syariah (sharia audit report) yang menjadi acuan penting bagi stakeholders, termasuk dewan pengawas syariah (DPS), manajemen, regulator, hingga publik. Laporan ini bukan hanya mencantumkan kepatuhan formal terhadap fatwa dan regulasi, tetapi juga memberikan evaluasi terhadap potensi penyimpangan dan rekomendasi perbaikan. Dalam banyak kasus, hasil audit syariah bahkan dapat mempengaruhi citra dan reputasi lembaga keuangan syariah di mata publik. Oleh karena itu, integritas, objektivitas, dan profesionalisme auditor syariah menjadi hal yang sangat krusial untuk dipelihara.

Dalam struktur tata kelola lembaga keuangan syariah, auditor syariah juga memiliki relasi fungsional dengan Dewan Pengawas Syariah. Auditor memberikan data, temuan, dan analisis kepada DPS sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan atau mengeluarkan rekomendasi tertentu. Dalam konteks ini, sinergi antara auditor syariah dan DPS sangat diperlukan agar pengawasan syariah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, independensi auditor syariah tetap harus dijaga agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang dapat mengaburkan objektivitas hasil audit.

2. Konsep Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang terutama bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Prinsip dasar yang menjadi landasan operasional LKS mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang merugikan), maysir (spekulasi/judi), serta keharusan untuk melakukan kegiatan bisnis yang halal dan bermanfaat secara sosial. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga pada aspek moral dan sosial dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, LKS diposisikan sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan distributif, keseimbangan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. (Gunawan 2023)

Secara umum, LKS dapat mencakup berbagai bentuk institusi keuangan, baik bank maupun non-bank. Dalam kategori perbankan, terdapat bank syariah dan unit usaha syariah dari bank konvensional. Bank syariah menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan dengan menggunakan kontrak-kontrak syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa),

dan wakalah (perwakilan). Sementara itu, lembaga non-bank syariah meliputi asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat, infaq, dan wakaf yang juga memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan Islam. Semua bentuk lembaga ini tunduk pada pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta otoritas keuangan negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Karakteristik utama LKS yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional terletak pada orientasi dan mekanisme transaksinya. Jika lembaga konvensional beroperasi dengan basis bunga dan kontrak hutang, maka LKS mengedepankan prinsip kemitraan, keadilan, dan risiko yang ditanggung bersama. Dalam hubungan antara nasabah dan LKS, akad-akad syariah digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi. Sebagai contoh, dalam akad murabahah, bank membeli barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati, bukan memberikan pinjaman berbunga. Hal ini memperlihatkan bahwa LKS juga menanamkan nilai-nilai etika dalam setiap kegiatan keuangan yang dilakukan. (Fatimah 2022)

Fungsi sosial LKS menjadi aspek penting lainnya yang memperkuat peran institusi ini dalam membangun ekonomi yang inklusif. Tidak seperti sistem keuangan konvensional yang murni berorientasi pada profitabilitas, LKS memiliki tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok marjinal dan pelaku usaha kecil. Melalui pembiayaan mikro syariah, program zakat produktif, dan pembentukan dana wakaf tunai, LKS diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Kegiatan ini selaras dengan maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keberadaan LKS bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan umat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, LKS juga menghadapi tantangan dalam menjaga relevansi dan daya saingnya. Inovasi produk, digitalisasi layanan, dan kebutuhan akan SDM profesional yang memahami syariah dan keuangan secara holistik menjadi isu strategis yang harus direspons dengan serius. LKS tidak dapat hanya mengandalkan kekhasan syariah sebagai daya tarik semata, melainkan harus mampu menawarkan efisiensi, kenyamanan, dan solusi keuangan yang kompetitif. Oleh sebab itu, kolaborasi antara otoritas, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur, regulasi, dan edukasi terkait sistem keuangan syariah secara menyeluruh. (Amelia 2023)

Perkembangan lembaga keuangan syariah di tingkat global juga menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan secara strategis. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain telah menjadi pusat keuangan syariah dunia dengan infrastruktur hukum dan kelembagaan yang kuat. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini, namun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi keuangan syariah, integrasi sistem, dan pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi, serta peningkatan kompetensi para pelaku industri menjadi prasyarat mutlak untuk menjadikan LKS sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di masa depan.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

statistik atau bentuk perhitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan library research (kajian pustaka) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis, suatu metode yang digunakan dengan jalan menelaah beberapa buku sebagai sumber datanya. (Marzuki 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keterampilan dan Pengetahuan yang Diperlukan untuk Auditor Syariah di Lembaga Keuangan

Auditor syariah merupakan elemen kunci dalam struktur tata kelola lembaga keuangan syariah. Fungsi utama auditor syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis, operasional, dan kebijakan lembaga keuangan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum Islam. Dalam menjalankan tugas tersebut, auditor syariah tidak hanya dituntut untuk memahami aspek teknis audit dan akuntansi, tetapi juga harus memiliki penguasaan mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan muamalah (hukum transaksi). Oleh karena itu, analisis terhadap keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi auditor syariah menjadi aspek strategis dalam upaya menjamin kualitas pengawasan dan kepatuhan syariah (sharia compliance) di lingkungan lembaga keuangan syariah. (Ardi 2023)

Dari sisi pengetahuan (knowledge), auditor syariah dituntut memiliki kompetensi ganda yang tidak dimiliki oleh auditor konvensional. Pengetahuan pertama yang wajib dimiliki adalah pemahaman menyeluruh terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama fikih muamalah. Ini mencakup pemahaman tentang akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, kafalah, dan lain sebagainya, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga fatwa lainnya yang menjadi rujukan. Auditor syariah harus mampu menafsirkan dan menerapkan fatwa tersebut dalam konteks teknis operasional lembaga keuangan. Selain itu, penguasaan terhadap maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) menjadi sangat penting, karena memberikan kerangka etis dan filosofis dalam menilai apakah suatu produk atau aktivitas tidak hanya halal secara tekstual, tetapi juga sesuai dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. (Khasani 2023)

Selain pengetahuan syariah, auditor syariah juga harus memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik audit internal dan eksternal, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta pemahaman terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Hal ini mencakup pemahaman terhadap standar audit syariah yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), serta standar internasional lain seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) yang masih relevan dalam konteks pelaporan keuangan. Kombinasi pemahaman antara prinsip syariah dan standar profesional audit akan memungkinkan auditor untuk menilai kepatuhan dan integritas lembaga secara komprehensif, serta memberikan rekomendasi yang berbobot dan dapat diterapkan secara praktis oleh manajemen.

Dari sisi keterampilan (skills), auditor syariah membutuhkan kemampuan analisis yang tinggi. Ia harus mampu membaca dan mengevaluasi laporan keuangan, kontrak pembiayaan, dokumen kebijakan, dan aktivitas operasional dengan perspektif kritis dan integratif. Kemampuan ini mencakup keterampilan investigatif, yaitu kemampuan untuk mendeteksi adanya potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah, baik secara sengaja maupun karena kelalaian prosedural. Dalam banyak kasus, penyimpangan terhadap syariah bukan terjadi karena niat pelanggaran, tetapi akibat kurangnya pemahaman teknis di level

operasional. Auditor syariah yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan dapat menjembatani temuan audit dengan upaya perbaikan yang solutif dan edukatif. (Fatimah 2022)

Selain keterampilan teknis, auditor syariah juga harus memiliki keterampilan interpersonal dan etika profesional yang tinggi. Independensi, objektivitas, dan integritas merupakan nilai-nilai utama yang harus dijunjung dalam setiap tahapan audit. Auditor syariah sering kali berada dalam posisi yang dilematis: antara menjaga hubungan baik dengan manajemen lembaga keuangan, dan pada saat yang sama harus bersikap tegas dalam menyampaikan temuan audit yang mengandung ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keterampilan diplomasi, kepemimpinan moral, dan kepekaan terhadap nilai etika Islam menjadi atribut penting yang membedakan auditor syariah dari auditor konvensional. Dalam situasi seperti ini, seorang auditor syariah dituntut untuk tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan cara yang membangun dan solutif.

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah dan makin kompleksnya produk serta jasa yang ditawarkan, kebutuhan terhadap auditor syariah yang profesional dan berkompeten menjadi semakin mendesak. Lembaga keuangan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan praktis untuk menghadapi tantangan riil di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas melalui pelatihan profesional, sertifikasi kompetensi, serta integrasi kurikulum pendidikan ekonomi syariah dan audit menjadi keharusan. Di Indonesia misalnya, berbagai lembaga telah mulai menawarkan sertifikasi auditor syariah, namun standarisasi dan pengakuan formal terhadap kompetensi ini masih perlu ditingkatkan agar dapat menyelaraskan antara kebutuhan industri dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

KESIMPULAN

Analisis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk auditor syariah menunjukkan bahwa profesi ini bukanlah pekerjaan yang sederhana. Ia berada di titik pertemuan antara akuntansi, syariah, hukum, manajemen, dan etika. Dengan kompleksitas tugas tersebut, penguatan kapasitas dan profesionalisme auditor syariah menjadi prioritas utama dalam menjaga kredibilitas dan integritas sistem keuangan syariah. Ke depan, peran auditor syariah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping strategis bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan transformasi menuju sistem ekonomi Islam yang lebih berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Erika. "Pengaruh Audit Internal Terhadap Mitigasi Risiko Operasional Perbankan Syariah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2023: 57–78.
- Ardi, Muhammad. "Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023: 169–176.
- Fatimah, Nurul. "EFEKTIFITAS AUDIT INTERNAL SYARIAH DI PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2022: 179–187.
- Gunawan, Marhadi. "Praktik Dalam Audit Dan Peran Auditor Syariah (Karakteristik, Konseptual, Dan Tantangan)." *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 2023: 21-31.
- Khasani, Amirul Hadi. "Tenure Audit, Reputasi Auditor Dan Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur: Analisis Kompleksitas Operasi Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2023: 1-18.
- Lubis, Rusdi Hamka. "Review Studi Perbandingan Audit Syariah Dan Konvensional di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2023: 1–9 .
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

- Nuha, Gardina Aulin. "REVIEW AUDIT DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 2021: 76–86.
- Sakti, Muhammad Rizky Prima. "Corporate Governance from an Islamic Moral Economy Perspective: The Dimensions and Analysis." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* , 2021: 359–78.